

BAB I

PENDAHULUAN

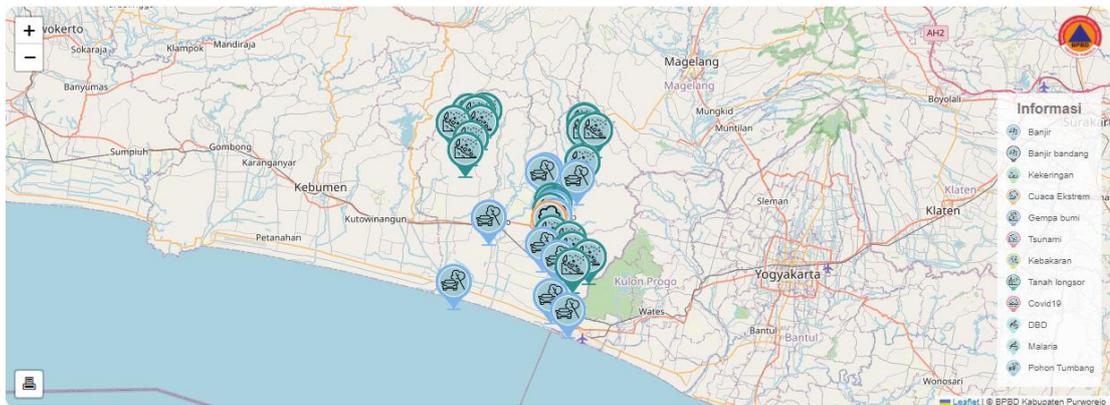
A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari gabungan beberapa kepulauan, Indonesia memiliki potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi dan situasi alam tersebut membentuk keanekaragaman penduduk dan budaya di Indonesia serta menyebabkan timbulnya risiko terjadinya bencana alam (Sikumbang, Zainun, and Zubaidi 2018). Maka dari itu Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami bencana alam, dibuktikan dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang 1 Januari hingga 26 Agustus 2022, total ada 1.902 bencana alam telah melanda Indonesia. Akibat bencana ini, menimbulkan orang-orang mengungsi sekitar 2.399.287 orang, sedangkan meninggal dunia 98 orang, hilang sebanyak 15 orang dan luka-luka 679 orang. BNPB mencatat bencana yang mendominasi hidrometeorologi yakni sebanyak 737 akibat peristiwa banjir. Kemudian diikuti dengan cuaca ekstrem sebanyak 687 kejadian, tanah longsor sebanyak 364 kejadian, gelombang pasang dan abrasi sebanyak 11 kejadian, gempa bumi 12 kejadian. BNPB juga mencatat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 90 kejadian, dan 1 kejadian kekeringan terjadi sepanjang 2020. Sementara itu, tiga Provinsi di Pulau Jawa yang tercatat paling banyak terjadi bencana alam yaitu di Jawa Barat dengan 482

kejadian, di Jawa Tengah dengan 316 kejadian, dan di Jawa Timur sebanyak 240 kejadian bencana (BP 2022).

Purworejo merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki potensi cukup tinggi mengalami bencana alam, ancaman bencana alam ini bisa kapan saja terjadi dan menghantui beberapa desa di daerah Purworejo.

Gambar 1.1 Informasi Bencana Keseluruhan



Sumber : e-SISKA Purworejo (2023)

Dapat dilihat dari data informasi bencana keseluruhan di Purworejo terdapat beberapa bencana alam yang melanda Purworejo seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem dan pohon tumbang. Bencana alam yang melanda Kabupaten Purworejo hampir tersebar secara merata di setiap daerah kecamatan maupun desa. Dari data informasi tersebut bencana yang kerap terjadi ketika musim hujan yaitu banjir, pohon tumbang dan longsor. Tanah longsor dan pohon tumbang seringkali terjadi di wilayah dataran tinggi yaitu Bruno dan Kaligesing. Sedangkan banjir biasanya terjadi di Bagelen, Ngombol dan sekitarnya.

Grafik 1.1 Komposisi Bencana Menurut Waktu



Sumber : e-SISKA Purworejo (2023)

Dilihat dari grafik komposisi bencana diatas terdapat 9 bencana alam yang ada di Kabupaten Purworejo. Namun ada 3 jenis bencana alam yang kerap kali terjadi dengan intensitas jumlahnya yang banyak di Kabupaten Purworejo yaitu : Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrem. Total keseluruhan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 1 tahun dari bulan Januari hingga Desember yaitu 42 kejadian bencana alam. Bencana alam yang paling banyak terjadi secara berturut-turut selama tiga bulan yaitu pada bulan Oktober sampai Desember, yang mana pada waktu tersebut memasuki musim hujan. Pada bulan Oktober terdapat 18 kejadian bencana alam, bulan November terdapat 8 kejadian dan terakhir di bulan Desember ada 16 kejadian. Selama 1 tahun dari bulan Januari sampai Desember bencana alam pohon tumbang, tanah longsor, dan banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Kabupaten Purworejo.

Adapun langkah-langkah untuk pengurangan resiko bencana yang sudah dilakukan oleh BPBD Purworejo antara lain mitigasi structural yang dilakukan untuk mencegah banjir yaitu dengan membangun bendungan Bener bertujuan mengurangi debit air agar tidak banjir, selain itu untuk longsor sudah dibangun senderan dan brojong di beberapa titik. Kemudian sudah dipasang juga alat sistem peringatan dini EWS (early warning system) baik pada lokasi rawan banjir, longsor maupun tsunami. Untuk mitigasi non structural sudah diadakan sosialisasi dan simulasi terkait bencana banjir, longsor, tsunami, dan gempa bumi di beberapa tempat (R-1 2022). Selain melalui sosialisasi dan simulasi mengenai bencana alam, penyampaian informasi terkait pencegahan bencana yaitu lewat sosial media dengan disembarkannya informasi melalui grup media sosial yang berisi tokoh masyarakat, muspika, dan pemerintah desa mengenai kewaspadaan akan cuaca ekstrem dan fenomena la lina di Indonesia karena fenomena ini dapat menyebabkan hujan lebat disertai petir dan angin kencang, hujan ekstrem ini berlangsung lama dan berpotensi menyebabkan banjir, tanah longsor, angin ribut (Rakyat 2020). Pada kenyataannya yang terjadi di lapangan masih terdapat beberapa kerusakan yang cukup parah akibat dari bencana alam yang terjadi di purworejo seperti akibat musim hujan dan menyebabkan tanah longsor, beberapa rumah rusak parah karena tanah longsor sehingga pemiliknya harus mengungsi, kerusakan infrastruktur yang terjadi yaitu jalan penghubung antara desa satu dengan lainnya amblas, jembatan mengalami kerusakan pondasi dan amblas, ruas jalan kabupaten juga ikut amblas (BPBD 2022).

Pemerintah melalui lembaga pemerintah non-departemen, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang mempunyai tugas membantu pemerintah Indonesia dalam penanggulangan bencana sesuai dengan amanat yang tercantum pada UU No. 24 Tahun 2007. Selain itu juga dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh BNPB. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, tugas pokok BPBD adalah membantu penanganan bencana alam dan masyarakat, serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik dalam rangka penanggulangan bencana yang baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam bentuk layanan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan (Prissando 2021).

Pengetahuan mengenai mitigasi bencana memang perlu diterapkan di setiap Individu, supaya tidak menimbulkan korban jiwa sehingga dapat meminimalisir dampak dari bencana itu sendiri seperti kata dari wabup Purworejo “Pengetahuan dan pemahaman mengenai kebencanaan dan penanggulangannya harus dimiliki setiap individu, mengingat Kabupaten Purworejo merupakan daerah yang memiliki rawan bencana. Untuk itu harus diwaspadai dengan mengetahui potensi bencana yang terdapat di daerah tempat tinggal” (Redaksi 2022). Akan tetapi berbeda dengan keadaan di lapangan, masyarakat masih merasakan dampak kerugian yang begitu besar atas bencana alam yang sudah terjadi.

Sesuai dengan Undang-Undang RI No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdapat beberapa pasal terkait pentingnya informasi

kebencanaan. Pasal 21 (c) menyebutkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. Pasal 26 ayat 1(c) disebutkan setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi secara tertulis atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Pasal 27 (c) menyatakan setiap orang berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Berdasarkan pasal di atas terlihat jelas bahwa informasi kebencanaan merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat. Kejelasan informasi akan menentukan cara individu bereaksi terhadap bencana. Penyampaian informasi termasuk proses mitigasi bencana alam yang bertujuan untuk menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkannya. Peran komunikasi risiko bencana yang merupakan bagian dari komunikasi lingkungan, menjadi hal mendasar dalam manajemen komunikasi bencana (Asteria 2016).

Berdasarkan permasalahan tersebut dan komunikasi itu berarti penting untuk sebuah kebijakan kebencanaan serta penanggulangan bencana alam, adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana model komunikasi yang dilakukan oleh BPBD saat penanggulangan bencana alam. Oleh sebab itu peneliti menganggap penting untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul **Model Komunikasi BPBD Kabupaten Purworejo Dalam Penanggulangan Bencana Alam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana model komunikasi BPBD Kabupaten Purworejo dalam penanggulangan bencana alam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana model komunikasi BPBD Kabupaten Purworejo dalam penanggulangan bencana alam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi dan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Pemerintahan dan pada bidang pelayanan publik di Indonesia, khususnya pada model komunikasi BPBD kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan evaluasi diri kepada pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan komunikasi yang baik kepada masyarakat terkhusus pada instansi terkait yaitu BPBD Kabupaten Purworejo. Selain itu, diharapkan juga dapat bermanfaat sebagai pertimbangan saran bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan komunikasi bencana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan masyarakat agar mengetahui

bagaimana bentuk komunikasi BPBD Kabupaten Purworejo sudah berjalan baik atau belum ketika menanggulangi bencana.

E. Literature Review

Peneliti membahas literature review yang relevan dengan penelitian ini. Pembahasan kajian pustaka bertujuan untuk menemukan sisi yang menarik dalam penelitian dan mengklasifikasikan perbedaan penelitian yang sedang di laksanakan dengan penelitian yang telah di lakukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan 30 artikel jurnal tentang Mitigasi Bencana dari tahun 2012-2022. Terdapat 5 artikel membahas mengenai Pendidikan Mitigasi Bencana, penelitian dari (Hayudityas 2020) menjelaskan bahwa pendidikan mitigasi bencana di sekolah ternyata sudah menunjukkan hasil yang cukup siap dengan hasil siklus pertama 69% mengalami peningkatan menjadi 74% dengan presentase gain yaitu 8%, temuan tersebut sejalan dengan penelitian dari (Atmojo 2020) yang menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dan simulasi dalam menghadapi bencana sangat diperlukan baik untuk guru maupun anak usia SD, selain itu didukung oleh penelitian dari (Sopacua and Salakay 2020) dengan hasil penelitiannya yaitu BPBD Kota Ambon harus memiliki langkah dan strategi bukan saja sosialisasi secara manual. Namun dua artikel tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian dari (Pahleviannur 2019) yang menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan siswa tentang mitigasi bencana perlu ditingkatkan lagi akibatnya pengetahuan mitigasi yang rendah dapat meningkatkan jumlah korban jiwa akibat bencana, dan penelitian dari (Niken and Andri Setyorini 2020) yang membahas mengenai tingkat kesiapsiagaan bencana di Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Pleret mayoritas dalam kategori siap.

Kemudian terdapat 9 artikel dengan klasifikasi tema Mitigasi Bencana, penelitian dari (Nursyabani, Putera, and Kusdarini 2020) menjelaskan bahwa secara umum kegiatan mitigasi bencana dalam peningkatan kewaspadaan ancaman gempa bumi di Unand belum optimal, lain halnya dengan penelitian dari (Urbanus, Sela, and Tungka 2021) yang menjelaskan mitigasi struktural dan non struktural melihat dimana wilayah yang berada di kelas risiko bencana banjir tinggi akan lebih berfokus pada tahap perencanaan, wilayah yang berada di kelas risiko sedang akan berfokus pada aturan dan sistem penambahan, penelitian ini didukung dengan penelitian dari (Sekar Ningrum and Br Ginting 2020) strategi penanganan banjir basis mitigasi bencana di Kota Langsa terbagi menjadi dua yaitu mitigasi structural dan non structural dan sejalan dengan penelitian dari (Maharani, Sumaryoto, and Musyawaroh 2021), dengan hasil penelitiannya yaitu penerapan mitigasi public yang diproyeksikan pada obyek rancang Pusat Edukasi dan Penanggulangan Bencana di DIY meliputi area zona kawasan dan sirkulasi kawasan serta areal bangunan. Sedangkan penelitian dari (Putri and Hamzah 2021), menjelaskan bahwa mitigasi bencana keterlibatan media memastikan pesan dan informasi yang disampaikan akurat, cepat dan tepat, menyasar yaitu dengan Apl PeduliLindungi, artikel ini sejalan dengan penelitian dari (Lukmanudin, Yusuf, and Lesmana 2017), (Lukmanudin, Yusuf, and Lesmana 2017) yaitu sistem android dalam mitigasi bencana implementasi dan pengujian sistemnya berjalan dengan baik dan dapat digunakan untuk melaporkan bencana alam yang terjadi. Bertolak belakang dengan penelitian dari (Dewi, Istiadi, and Istiadi 2016) yang membahas kemampuan mitigasi bencana warga kampong naga terhadap perubahan iklim dipengaruhi

kearifan tradisional seperti konservasi hutan, bangunan dll, ada juga penelitian dari (Satrio Ageng Rihardi, Suwandoko, Rr. Yunita Puspandari 2022) yang membahas implementasi pengendalian usaha tambang berbasis mitigasi bencana dalam perspektif hukum lingkungan meliputi tahap prabencana terdiri atas persetujuan lingkungan, pembinaan dan pengawasan. Selain itu penelitian dari (Burhanudin 2019) membahas mengenai konsep mitigasi bencana sebagai tahap awal dalam manajemen memiliki keterkaitan dengan proses kebijakan dimana perlu menentukan posisi mitigasi bencana untuk dijadikan keputusan dalam kebijakan public.

Terdapat 5 artikel dengan tema Manajemen Mitigasi Bencana. Penelitian dari (Nurillah, Maulana, and Hasanah 2022) yang menjelaskan bahwa proses perencanaan penanggulangan bencana melalui manajemen mitigasi pendekatan di Kabupaten Ciwandan sudah dilaksanakan meskipun ada tahapan yang tidak maksimal. Artikel ini sejalan dengan penelitian dari (Widarti Gularsih Sukino et al. 2019) yaitu hasilnya program yang sudah direncanakan (planning) belum maksimal karena terdapat program yang belum mencapai target dan penelitian dari (Marina, Maulina, and Fadhlain 2021) dengan hasil pembahasannya yaitu manajemen komunikasi BPBD pada situasi terdapat bencana belum optimal dengan dibuktikan ada beberapa factor. Artikel lain yaitu penelitian dari (Buchari 2020) yang mengemukakan pelatihan tanggap bencana belum optimal masih sebatas kepada relawan yang dibentuk tiap RT/RW dikarenakan terbatasnya dukungan anggaran dari lembaga bencana maupun pemerintahan desa. Artikel ini hampir sejalan dengan penelitian dari (Irawan, Subiakto, and Kustiawan 2022) sama-sama

membahas mitigasi bencana bersama masyarakat dengan hasilnya yaitu manajemen mitigasi bencana yang baik dapat dilakukan beberapa langkah dan program mitigasi bencana bisa dilakukan melalui kegiatan masyarakat.

Selanjutnya ada 10 artikel dengan tema Kebijakan Pemerintah Dalam Mitigasi Bencana. Artikel dari penelitian (Juaningsih et al. 2020) mengemukakan bahwa menguraikan kebijakan pemerintah seperti PSBB dan undang-undang untuk penanganan covid-19 selama covid-19 berlangsung dan ini merupakan tindakan yang preventive untuk dilaksanakan pada saat itu. Artikel ini sejalan dengan penelitian dari (Shalih and Nugroho 2021) yaitu reformasi kebijakan yang harus dilakukan pada setiap fase kebencanaan dan dari aspek sistem penanggulangan, pendanaan, perencanaan dll. Selain itu didukung oleh penelitian dari (Marfuah et al. 2021) mengemukakan bahwa dalam rancangan pembuatan mitigasi bencana merupakan tahap awal dari penanggulangan bencana yang berkaitan dengan proses kebijakan public, dalam proses kebijakan public perlu ditentukan posisi pengurangan bencana sesuai keputusan kebijakan public. Berbeda dengan artikel dari (Muhammad and Aziz 2020) yang membahas mengenai implementasi kebijakan, dengan hasil pembahasannya yaitu implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir oleh BPBD Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung belum berjalan dengan maksimal, masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. artikel ini sejalan dengan penelitian dari (S R Nabila, N Tuah 2019) yaitu implementasi kebijakan penanggulangan kota Sukabumi belum optimal serta artikel jurnal dari penelitian (Soleh 2018) bahwa upaya mitigasi banjir di wilayah sungai Citarum belum berhasil. Untuk itu, kedepan implementasi undang-

undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri PUPR No. 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air harus benar-benar efektif . Tetapi dibantah dengan penelitian dari (Kasiami 2020) dengan hasil pembahasannya yaitu pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana di Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan prinsip penanggulangan bencana yang terdapat pada UUD No. 24 Tahun 2007. Didukung oleh penelitian dari (Sakti, Anwar, and Adriadi 2020) yang mengemukakan bahwa Kabupaten Bengkulu dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana sudah berjalan dengan baik. Penelitian dari (Putera, Valentina, and Rosa 2020) membahas mengenai implementasi kebijakan penataan ruang di kota Padang berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2012 sudah memperhatikan daerah rawan bencana. Hal ini bertolak belakang dengan pembahasan dari (Kuncoro and Indrawati 2019) yaitu komunikasi langsung adalah yang paling efektif untuk digunakan dalam implementasi kebijakan mitigasi bencana.

Penelitian dari (Admin and Tolapa 2020) menjelaskan bahwa strategi komunikasi BPBD Gorontalo menggunakan berbasis media, strategi design intruksional, dan strategi partisipatory. Hal ini ternyata hampir sejalan dengan penelitian dari (Ginting and Simamora 2020) yang mengemukakan hasilnya yaitu komunikasi BPBD Karo Regency kepada masyarakat menggunakan hal-hal yang menarik dan bersifat edukasi seperti contoh ada umbul-umbul, baliho, spanduk media sosial Facebook, Instagram, Wa group. Lain halnya dengan penelitian (Marina, Maulina, and Fadhlain 2021) yang membahas mengenai manajemen komunikasi dengan hasil pembahasannya yaitu manajemen komunikasi BPBD

Nagan Raya pada situasi terdapat bencana belum optimal salah satu faktornya karena masih minimnya sarana dan prasarana mitigasi bencana karena anggaran.

Terdapat 1 artikel mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana yaitu dengan hasilnya (Umeidini, Nuriah, and Fedryansyah 2019) mengemukakan bahwa adanya bentuk partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan bencana di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor, bentuk partisipasi masyarakat tersebut berupa partisipasi pemikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi barang dan partisipasi uang.

Tabel 1. 1 Ringkasan Hasil Tinjauan Pustaka

Klasifikasi Tema	Hasil Penelitian
Pendidikan Mitigasi Bencana	Beatrix Hayudityas (2020), Muhammad Eko Atmojo (2020), Muhammad Rizal Pahlevia nnur (2019), Yustina Sopacu (2020), Selvianus Salakay (2020), Niken Setyaningrum (2020), Andri Setyorini (2020) mengemukakan hasilnya yaitu tentang pentingnya pendidikan mitigasi bencana, kegiatan sosialisasi, strategi BPBD, simulasi, dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat di Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Pleret dalam menghadapi bencana.
Konsep Mitigasi Bencana	Nursyabani (2020) ,Roni Eka Putra (2020) , Kusdarini (2020), Ananda Urbanus (2021),

	<p>Rieneke Lusiana Evani Sela (2021), Aristotulus E (2021), Indarti Komala Dewi (2016), Yossa Istiadi (2016), Citra Eka Putri (2021), Radja Erland Hamzah (2021), Ayu Sekar Ningrum (2020), Kronika Br. Ginting (2020), Didin Lukmanudin (2017), Fahmi Yusuf (2017), Iwan Lesman (2017), Satrio Ageng Rihardi (2022), Suwandoko (2022), Rr. Yunita Puspendari (2022), Rafi Setiawan (2022) Burhanudin Mukhamad Faturahman (2018), Tania Khoira Maharani (2021), Sumaryoto (2021), Musyawaroh (2021), mengemukakan hasilnya menunjukkan bahwa mitigasi bencana dalam berbagai kondisi dan situasi, mitigasi structural dan non structural, kemampuan mitigasi bencana, dan mitigasi bencana berbasis apl serta digital.</p>
<p>Manajemen Mitigasi Bencana</p>	<p>Rd. Ahmad Buchari (2020), Irawan (2022), Yuli Subiakto (2022), Bambang Kustiawan (2022), Syifa Nurillah (2022), Delly Maulana (2022), Budi Hasanah (2022), Widarti Gularsih Sukino (2019), Muhammad Ahsan Samad (2019), Nasir Manggangsir (2019), Abdul Rival (2019), mengemukakan manajemen mitigasi bencana</p>

	yang baik dapat dilakukan beberapa langkah seperti melalui kegiatan masyarakat.
Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Bencana	Imas Novita Juaningsih (2020), Yosua Consuello (2020), Ahmad Tarmidzi (2020), Dzakwan Nur Irfan (2020), Osmar Shalih (2021), Riant Nugroho (2021), Marfuah (2021), Sinta Cempaka (2021), Ahmad Risdan (2021), Laila Rahmawati (2021), Made Yunia (2021), Rediana (2021), Risandi Koswara (2021), Feny Irfany Muhammad (2020), Yaya M Abdul Aziz (2020), Roni Ekha Putra (2020), Tengku Rika Valentina (2020), Siti Annisa Silvia Rosa (2020), Decky Kuncoro (2019), Indrawati (2019), Sri Kasiami (2020), Nabila Rahma Silmi (2019), Tuah Nur (2019), Dian Purwanti (2019), Soleh (2018), Pandu Sakti (2020), Faizal Anwar (2020), Rekho Adriadi (2020) hasil penelitiannya menguraikan kebijakan pemerintah menangani bencana, reformasi kebijakan, kebijakan public, dan implementasi kebijakan dari BPBD.
Komunikasi Pemerintah Menanggulangi Bencana	Minarni Tolapa (2020), Hariati Br Ginting (2020), Prietsaweny RT Simamora (2020), Friska Mariana (2021), Putri Maulina (2021), Said Fadhlain

	(2021) komunikasi pemerintah kepada masyarakat harus memiliki pesan yang mendidik dan menarik, serta ada beberapa media untuk menyampaikan, selain itu manajemen komunikasi pemerintah masih tetap ada yang kurang optimal.
Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana	Femil Umeidini (2019), Eva Nuriah (2019), Muhammad Ferdiansyah (2019) mengemukakan bahwa adanya bentuk partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan bencana di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor.

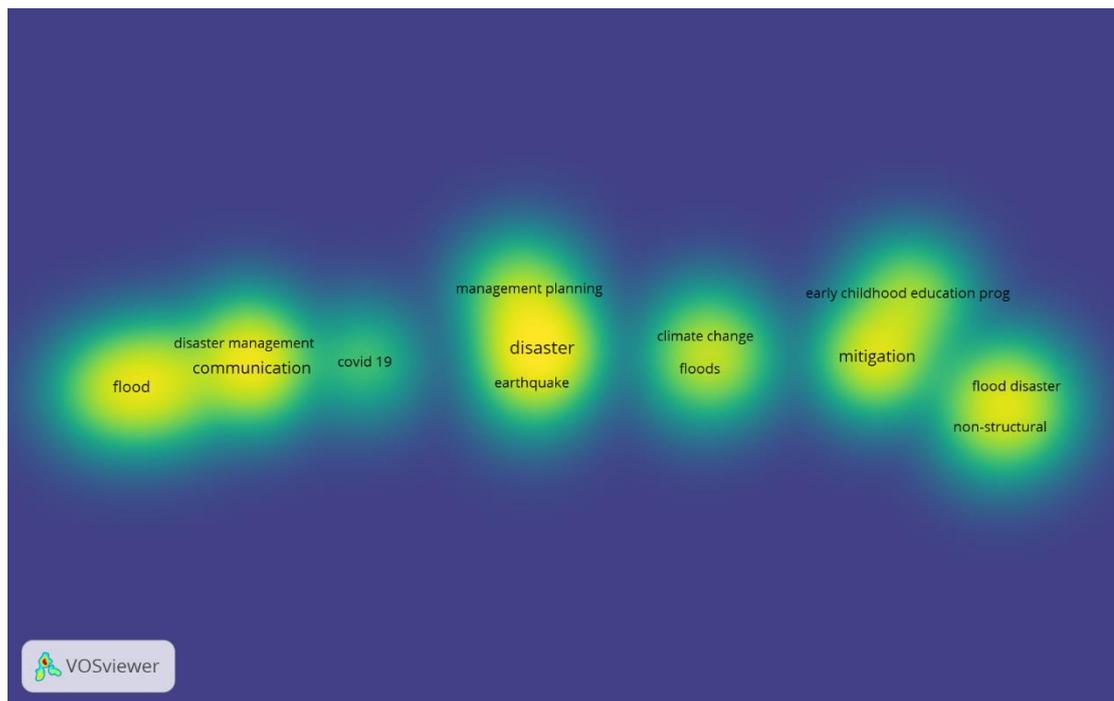
Sumber : diolah penulis, (2023)

Berdasarkan penjelasan pada table 1.1 hasil ringkasan tinjauan pustaka dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok yaitu Pendidikan Mitigasi Bencana, Mitigasi Bencana, Manajemen Mitigasi Bencana, Implementasi Mitigasi Bencana, Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Mitigasi Bencana, Komunikasi Pemerintah Menanggulangi bencana dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana. Namun belum ada secara komprehensif menjelaskan penelitian mengenai komunikasi pemerintah dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu peneliti akan fokus membahas mengenai bagaimana strategi komunikasi BPBD Kabupaten Purworejo dalam penanggulangan bencana.

Kemudian, penelitian ini menggunakan software vosviewers untuk memvisualisasikan literature review. Literature review yang dianalisis di software vosviewer sebanyak 30 artikel jurnal dari tahun 2012-2022 yang relevan dengan

penelitian ini. tujuan penggunaan Vosviewrs unuk menampilkan kebaharuan dalam sebuah penelitian. Gambar 1.2 menampilkan hasil analisis vosviewers tentang penanggulangan bencana.

Gambar 1.2 Hasil Analisis Vosviewer



Sumber : VOSviewers, (2023)

Berdasarkan gambar 1.2 vosviewers bahwa semakin kuning keyword menandakan banyak yang sudah meneliti, namun warna semakin hijau memiliki peluang untuk diteliti. Jadi keyword disaster, flood, mitigation, yang warnanya semakin kuning merupakan keyword yang sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Sedangkan keyword communication, covid-19, management planning, earthquake, climate change, disaster management dan lainnya dengan warna semakin hijau berarti menandakan bahwa keyword ini belum banyak yang

meneliti, artinya keyword tersebut memiliki peluang pembaharuan untuk diteliti. Pada penelitian kali ini maka peneliti mengambil keyword “communication” sebagai bahan yang akan diteliti.

F. Kerangka Teori

1. Komunikasi Bencana

a) Pengertian Komunikasi Bencana

Menurut Wursanto (2001:31) dalam (Oktavia 2016) , komunikasi adalah proses kegiatan pengoperan/penyampaian warta/berita/informasi yang mengandung arti dari satu pihak (seseorang atau tempat) kepada pihak (seseorang atau tempat) lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.

Berikut definisi Komunikasi menurut para ahli komunikasi :

1. Carl I. Hovland: Komunikasi adalah proses di mana individu mentransmisikan stimulus untuk mengubah perilaku individu yang lain.
2. Everett M. Rogers: Komunikasi adalah proses yang di mana suatu ide atau gagasan dialihkan dari sumber kepada suatu penerima, dengan maksud mengubah suatu tingkah laku mereka.

3. David K. Berlo: Komunikasi sebagai instrumen dari interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan memprediksi setiap orang lain, juga untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan masyarakat.
4. Prof. Dr. Alo Liliweri: Komunikasi adalah pengalihan suatu pesan dari satu sumber kepada penerima agar dapat dipahami.
5. Edward Depari: Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti yang dilakukan oleh penyampaian pesan ditujukan kepada penerima pesan.
6. Everett M. Rogers: Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam.
7. Lasswell: Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.

Dalam penanganan bencana alam informasi yang sangat akurat dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah, maupun lembaga swasta yang memiliki rasa kepedulian atau tanggung jawab kepada korban akibat bencana alam. Menurut Haddow and Haddow dalam (Rudianto 2015) komunikasi bencana tidak dibutuhkan pada saat dalam kondisi darurat bencana saja, akan tetapi penting juga pada

saat dan pra bencana. Seperti yang sudah dikemukakan bahwa komunikasi merupakan cara yang paling baik dalam mitigasi bencana alam, persiapan, respon dan pemulihan keadaan pada saat setelah terjadinya bencana. Kemampuan dalam mengkomunikasikan informasi bencana atau pesan kepada public, masyarakat, pemerintah, media dapat mengurangi resiko bencana serta menyelamatkan hidup dari dampak bencana itu sendiri.

Lestari mengemukakan dalam (Iqbal et al. 2021) komunikasi bencana adalah sebuah proses pembuatan, pengiriman dan berakhir pada penerimaan pesan kepada satu orang atau lebih secara langsung maupun di media dalam konteks bencana pada saat prabencana, terjadi bencana dan setelah bencana serta pesan tersebut menimbulkan respon atau umpan balik.

b) Konteks Komunikasi Bencana

Dalam buku Humas dan Komunikasi Bencana (Nurjanah Adhianty, Ishak Aswad 2021) menyatakan ada 7 (tujuh) konteks komunikasi yang bisa dijadikan sudut pandang dalam komunikasi bencana yaitu :

1. Komunikasi Intrapersonal

Komunikasi yang terjadi didalam individu masing-masing, individu tersebut berperan sebagai komunikator.

2. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi ini terjadi antara dua individu, satu individu menjadi komunikator dan individu lainnya menjadi penerima pesan.

3. Komunikasi Kelompok

Komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang misalnya komunikasi relawan dengan membantu warga di posko pengungsian.

4. Komunikasi Organisasi

Komunikasi yang terjadi di lingkungan yang besar dan luas serta adanya struktur. Seperti contoh komunikasi pada BNPB, Basarnas, PMI yang berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat.

5. Komunikasi Publik

Komunikasi yang berarti sebagai penyebaran informasi dari satu orang ke khalayak umum.

6. Komunikasi Massa

Proses komunikasi dilakukan secara besar dan jumlahnya banyak, seperti disebarkan di media massa.

7. Komunikasi Lintas Budaya

Komunikasi yang terjadi antarindividu yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Ketika relawan bertemu dengan pengungsi atau korban bencana yang memiliki latar belakang budaya berbeda.

c) Model Komunikasi Bencana

Model Perencanaan Komunikasi Cutlip dan Center Model yang dibuat oleh Cutlip dan Center ini adalah model proses public relations yang terdapat langkah-langkah yaitu penemuan fakta (fact finding), kemudian perencanaan (planning), selanjutnya komunikasi (communication), dan terakhir evaluasi (evaluation) (Gladys 2017). Model ini bisa digunakan sebagai acuan atau landasan dalam komunikasi kebencanaan. Komunikasi yang efektif harus dilaksanakan melalui empat proses pokok menurut Scoot M. Cutlip dan Allen H. Center mengenai menyatakan bahwa proses perencanaan komunikasi yang menjadi landasan atau acuan untuk melakukan pelaksanaan kebijakan, yaitu :

- a. Penemuan fakta (fact finding). Menentukan masalah atau fakta yang terjadi ketika terjadi bencana alam meliputi kegiatan mengawasi dan pemantauan pengetahuan, fenomena, opini, sikap, dan perilaku masyarakat yang berkepentingan atau terpengaruh oleh tindakan dan kebijakan organisasi. Langkah ini merupakan kegiatan bagi BPBD untuk mengumpulkan informasi kebencanaan atau data di lapangan seperti jumlah bencana yang terjadi, dampak adanya bencana alam, jumlah korban jiwa dan sebagainya yang digunakan untuk dasar berpijak bagi humas guna mengambil langkah selanjutnya.

- b. Perencanaan (planning). Tindakan untuk memasukkan temuan yang diperoleh pada langkah pertama dalam kebijakan dan program organisasi. BPBD kemudian mengolah data dan informasi yang sudah didapat untuk kemudian merencanakan sebuah program guna mengurangi dampak dari bencana alam kepada masyarakat.
- c. Komunikasi (communication). Mencakup kegiatan untuk melaksanakan tindakan dan komunikasi yang sudah dirancang sejak awal untuk mencapai tujuan tertentu. Langkah ini merupakan hal terpenting karena BPBD merealisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai kebijakan atau program yang telah dibuat yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan simulasi mengenai bencana alam, menyebarkan informasi lewat sosial media, spanduk, dan banner terkait kewaspadaan atau penanggulangan ketika terjadi bencana alam.
- d. Evaluasi (evaluation). Mencakup penilaian atau evaluasi atas persiapan, dan pelaksanaan program yang sudah dibuat. Tahap ini BPBD pastinya mengevaluasi dan melihat sejauh mana informasi atau komunikasi yang sudah disebarkan ke masyarakat berjalan dengan baik atau terdapat kendala. Selain itu respon dari masyarakat merupakan sebuah kunci ketika informasi ini bisa dikatakan efektif atau tidak.

2. Penanggulangan Bencana

Menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2007, tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana ialah serangkaian peristiwa atau upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat, dan setelah bencana. Penanggulangan bencana sendiri merupakan kegiatan untuk mengurangi resiko dan ancaman ketika terjadi bencana. Adapun beberapa tahap dalam proses penanggulangan bencana meliputi :

a. Pra Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 dapat dilakukan sebelum bencana terjadi melalui beberapa kegiatan, yaitu kesiapsiagaan bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana. Kesiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Membangun kesiagaan adalah unsur penting, namun tidak mudah dilakukan karena menyangkut sikap mental dan budaya serta disiplin di teman masyarakat. Kesiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana. Peringatan dini, langkah ini diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum kejadian seperti banjir, gempa bumi, tsunami, letusan

gunung api atau badai terjadi. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Mahardika and Setianingsih 2018).

b. Tanggap Darurat Bencana

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, tanggap darurat bencana merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat terjadi bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Kegiatan ini meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan, pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

c. Pasca Bencana

Pasca bencana dapat dilakukan dengan adanya rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya

hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. (Alam, Nurcahyanto, and Sulandari 2013).

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah menjelaskan secara abstrak suatu konsep dengan cara singkat dan jelas. Maka dari itu definisi konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi bencana adalah tindakan yang mengacu pada satu orang atau lebih untuk menyebarkan suatu informasi yang mengandung makna/arti dalam hal kebencanaan, tidak hanya pada saat terjadi bencana alam namun pra bencana dan pasca bencana alam. Dapat dimulai dari tahap awal proses, pengumuman, dan penerimaan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media tertentu dengan cara yang menarik dan mengedukasi.
2. Penanggulangan Bencana ialah serangkaian usaha yang dilakukan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, sesaat, dan setelah bencana. Penanggulangan bencana sendiri merupakan kegiatan untuk mengurangi resiko bencana dan ancaman bencana.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu hal yang mendasar pada sebuah penelitian, karena bagian ini merupakan sebuah konsep yang sifatnya abstrak

yang berguna untuk memudahkan mengukur suatu variable penelitian. Pada bagian ini akan ditentukan variable penelitian dan mengukur indicator variable penelitian tersebut, maka definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah model komunikasi dari Cutlip Center dengan empat indicator didalamnya.

Tabel 1.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Parameter
Model Komunikasi Bencana Scoot M. Cutlip dan Allen H. Center	Penemuan fakta (fact finding)	1) Pemetaan data atau dokumen kebencanaan oleh BPBD Purworejo 2) Penemuan fakta penanggulangan bencana alam dari BPBD Purworejo
	Perencanaan (planning)	1) Proses membuat program penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh BPBD
	Komunikasi (communication)	1) Mengkomunikasikan program BPBD Purworejo ke masyarakat 2) Media yang digunakan untuk penyebaran program
	Evaluasi (evaluation)	1) Mengevaluasi program BPBD Purworejo dari tahap awal pemetaan data bencana alam sampai mengkomunikasikan program BPBD Purworejo 2) BPBD Purworejo menerima respon atau feedback dari masyarakat

Sumber : diolah penulis (2023)

I. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian mengenai sebuah riset yang bersifat menjelaskan/deskriptif dan kebanyakan menggunakan analisis, penelitian kualitatif memiliki sifat penemuan (Wekke Suardi 2019). Maka dari itu penelitian ini memilih jenis kualitatif karena pantas untuk menjawab rumusan masalah dan menjelaskan tujuan penelitian. Dengan adanya penelitian kualitatif diharapkan peneliti akan lebih focus dalam pengolahan secara terang-terangan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Penelitian ini juga menggunakan metode atau pendekatan studi kasus. Stake mengemukakan bahwa penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat kompleks maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi (Nursalam 2016). Studi kasus merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, memiliki tujuan program, terperinci, peristiwa dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, lembaga, maupun organisasi. Dalam penelitian ini studi kasusnya yaitu komunikasi BPBD Kabupaten Purworejo dalam penanggulangan bencana alam. Dengan kegiatan yang menjadi fokusnya adalah yang sudah tertulis pada program kerja penanggulangan bencana alam di BPBD Kabupaten Purworejo.

J. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif yang dimaksud dengan data adalah segala informasi baik lisan maupun tulisan, bahkan bisa berupa gambar atau foto yang berguna untuk menjawab masalah penelitian sebagaimana yang dinyatakan dalam rumusan masalah atau fokus penelitian. Sumber data kualitatif dapat dibedakan atas: subjek penelitian, objek penelitian dan responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bisa berupa data kepustakaan yang berupa dokumen, maupun data dari pihak pertama yaitu berupa hasil wawancara, dimaksudkan penelitian ini ingin langsung mendapatkan data dari pihak yang terlibat langsung dalam masalah penelitian ini. Sehingga data yang didapat jelas dan terpercaya yang kemudian dapat diolah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian. Peneliti biasanya menggunakan data wawancara yang diperoleh dari informan sesuai topik penelitian sebagai data primer. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan di BPBD Purworejo.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder biasanya berupa berita online yang terpercaya dan kredibel seperti bpbd.go.id, bnpb.go.id, detik.com, dan purworejo.sorot.co, bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen atau arsip, website dan media sosial BPBD Kabupaten Purworejo.

K. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dari pihak yang berkaitan (dokumen/arsip maupun data oral dari narasumber/responden) dengan waktu yang cukup banyak untuk memperkuat analisis penelitian (Al Hamdi Ridho, Sakir, Suswanta, Eko Atmojo Muhammad 2020). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Menurut (Al Hamdi Ridho, Sakir, Suswanta, Eko Atmojo Muhammad 2020) wawancara adalah proses mendapatkan sebuah informasi antara pewawancara dengan yang diwawancarai baik secara langsung maupun online seperti via Skype, Zoom, Google Meet, WA chat, WA Video Call, SMS, Telepon dan platform lainnya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh peneliti dengan informan yang berkaitan dengan topik

penelitian yaitu dari BPBD Kabupaten Purworejo. Tabel berikut akan menampilkan narasumber wawancara dalam penelitian ini.

Tabel 1.3 Narasumber dan Tema Wawancara

No	Narasumber	Tema Wawancara
1	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo	Pelaksana dan perencanaan program komunikasi BPBD Purworejo
2	Kabag Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Perencanaan sebuah program BPBD Purworejo
3	Kabag Pengurangan Resiko Bencana BPBD	Penemuan fakta dan data di lapangan
4	Kabag Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Purworejo	Komunikator program komunikasi BPBD Purworejo
5	Tokoh Masyarakat	Respon dan penilaian terhadap program BPBD Purworejo

Sumber : diolah penulis (2022)

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah merupakan pengumpulan data oleh peneliti dari arsip-arsip, buku-buku, jurnal yang relevan dengan penelitian. Sumber yang lain dapat dipakai untuk teknik dokumentasi adalah melalui media online yaitu youtube, Facebook, Instagram, WA dan lainnya (Al Hamdi Ridho, Sakir, Suswanta, Eko Atmojo Muhammad 2020). Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, dengan data yang diperoleh dari berita online, jurnal-jurnal relevan, media sosial, website yang sesuai.

L. Teknik Analisis Data

Data yang telah ada dikumpulkan seperti wawancara dan dokumentasi akan diolah dengan beberapa tahapan sebelum digunakan Menurut (Al Hamdi Ridho, Sakir, Suswanta, Eko Atmojo Muhammad 2020) ada empat langkah dalam menganalisis data yaitu pengumpulan dan pengolahan data, seleksi data, analisis antar-variabel dan verifikasi data, dan penafsiran dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan dan pengolahan data

Pengumpulan data dari hasil wawancara dan studi dokumentasi dengan Sekretaris BPBD Kabupaten Purworejo, Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kabid Tanggap Darurat Evaluasi dan Penyelamatan, Kabid Kedaruratan Logistik, dan Masyarakat kemudian akan diolah dari wawancara menjadi “transkrip” sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data-data yang sudah terkumpul, dipilih dan dipilah sesuai indikator atau alat ukur yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Seleksi data

Ditahap ini, data-data yang telah disusun sesuai kategori akan dipilih dan dipilah kemudian diurutkan untuk mendapatkan data yang berguna serta sesuai dengan analisis model komunikasi BPBD kabupaten Purworejo dalam penanggulangan bencana alam.

c. Analisis antar variable dan verifikasi data

Selanjutnya, menghubungkan variable atau indicator dengan variable indicator lainnya. Sehingga dapat diperoleh model komunikasi BPBD kabupaten Purworejo dalam penanggulangan bencana alam. Data yang dihubungkan harus sesuai dengan indicator penemuan fakta (fact finding), perencanaan (planning), komunikasi (communication), dan evaluasi (evaluation).

d. Penafsiran dan penarikan kesimpulan

Semua hasil yang sudah disajikan, kemudian akan ditafsirkan sebagai usaha dalam menjawab sebuah rumusan masalah yang sudah ada diatas. Hasil penafsiran akan menjadi dasar untuk ditarik kesimpulan dari bab akhir rangkaian penelitian. Kesimpulan juga bisa berisi saran atau masukan kepada BPBD kabupaten Purworejo mengkomunikasikan informasi bencana alam dalam menanggulangi bencana alam.